

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Literasi Keuangan

1) Pengertian Literasi Keuangan

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/ 2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat. Literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.

Dalam Otoritas Jasa Keuangan (2017) mengidentifikasikan literasi keuangan sebagai pengetahuan dan pemahaman atas konsep dan risiko keuangan, berikut keterampilan, motivasi serta keyakinan untuk menerapkan pengetahuan dan pemahaman yang dimilikinya tersebut dalam rangka membuat keputusan yang efektif, meningkatkan kesejahteraan keuangan individu dan masyarakat, dan berpartisipasi dalam bidang ekonomi.

2) Tujuan Literasi Keuangan

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat, tujuan dari literasi keuangan sebagai berikut: Tujuan Literasi Keuangan adalah:

- a. meningkatnya kualitas pengambilan keputusan keuangan individu; dan
- b. perubahan sikap dan perilaku individu dalam pengelolaan keuangan menjadi lebih baik,

Sehingga mampu menentukan dan memanfaatkan lembaga, produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan.

3) Prinsip Dasar Literasi Keuangan

Prinsip-prinsip dasar di dalam Otoritas Jasa Keuangan, (2017) yang perlu dilakukan dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan antara lain :

a. Terencana dan terukur

Penerapan prinsip ini diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan dengan konsep yang sesuai sasaran, strategi, kebijakan otoritas, dan kebijakan PUJK serta mendasarkan pada indikator tertentu untuk memperoleh informasi peningkatan Literasi Keuangan;

b. Berorientasi pada pencapaian

Penerapan prinsip ini diwujudkan melalui kegiatan untuk mencapai tujuan peningkatan Literasi Keuangan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada;

c. Berkelanjutan

Penerapan prinsip ini diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang direncanakan serta memiliki aspek jangka panjang terhadap pemahaman Konsumen dan/atau masyarakat mengenai pengelolaan keuangan, lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan;

d. Kolaborasi

Penerapan prinsip ini diwujudkan melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan secara bersama-sama dengan memperhatikan peran masing-masing PUJK.

4) Tingkat Literasi Keuangan

Edukasi literasi keuangan perlu dilakukan di masyarakat. Menurut survei Otoritas Jasa Keuangan, (2017) tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

- a. *Well literate*, yaitu pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan dan produk jasa keuangan, termasuk karakteristik, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban yang terkait dengan produk dan layanan

keuangan, serta keterampilan dalam menggunakan produk dan layanan keuangan.

- b. *Sufficient literate*, Memiliki literasi budaya yang cukup dan memiliki pengetahuan dan keyakinan yang cukup tentang lembaga jasa keuangan dan produk dan jasa keuangan, termasuk karakteristik, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban yang terkait dengan produk dan jasa keuangan.
- c. *Less literate*, Tingkat pendidikan yang rendah, hanya pemahaman tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan.
- d. *Not literate*, kurangnya pengetahuan dan kepercayaan pada lembaga dan layanan keuangan serta produk dan layanan keuangan, dan kurangnya keterampilan untuk menggunakan produk dan layanan keuangan.

5) Indikator Literasi Keuangan

literasi keuangan diukur dengan 4 indikator dalam penelitian ini, menurut (Yanti, 2019) indikator tersebut antara lain:

a. Pengetahuan dasar tentang pengelolaan keuangan

Pengetahuan dasar tentang pengelolaan keuangan berkaitan pada pemahaman seseorang tentang bagaimana mengelola keuangan usaha, pribadi atau keluarga (Yanti, 2019). Pengelolaan keuangan adalah cara untuk mengelola keuangan secara efektif dan efisien (Saputri, 2019).

b. Investasi

Investasi adalah menyimpan sejumlah uang atau aset yang disimpan untuk memperoleh pendapatan lebih di masa yang akan datang (Latifiana, 2017).

c. Tabungan dan pengelolaan kredit

Pengelolaan tabungan adalah suatu cara untuk mencari kelebihan dana yang dimiliki individu untuk memperoleh likuiditas dengan cepat (Saputri, 2019). Pengelolaan kredit adalah suatu proses dimana pemilik usaha mengelola hutangnya agar digunakan secara tepat sesuai dengan tujuan awal pemberian pinjaman (Saputri, 2019).

d. Asuransi

asuransi adalah untuk mencegah atau meminimalkan risiko yang timbul dari pengambilan keputusan yang dibuat oleh seorang pengelola perusahaan (Saputri, 2019).

2.1.2. Inklusi Keuangan

1) Pengertian Inklusi Keuangan

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat, inklusi keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Consultative Group to Assist the Poor dalam Otoritas Jasa Keuangan, (2017) menjelaskan inklusi keuangan sebagai akses yang dimiliki oleh rumah tangga dan bisnis terhadap penggunaan produk dan layanan jasa keuangan secara efektif. Produk dan layanan jasa keuangan tersebut harus tersedia secara berkelanjutan dan teregulasi dengan baik. Menurut (Inclusion, 2016) mendefinisikan inklusi keuangan sebagai akses terhadap produk keuangan yang sesuai termasuk kredit, tabungan, asuransi, dan pembayaran, tersedianya akses yang berkualitas termasuk kenyamanan, keterjangkauan, kesesuaian dan dengan memperhatikan perlindungan konsumen, serta ketersediaan tersebut juga diberikan kepada semua orang.

2) Tujuan Inklusi Keuangan

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat, tujuan dari inklusi keuangan meliputi:

- a. Meningkatnya akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan PUJK.

- b. Meningkatnya penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang disediakan oleh PUJK yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.
- c. Meningkatnya penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.
- d. Meningkatnya kualitas pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

3) Prinsip Dasar Inklusi Keuangan

Prinsip dasar inklusi keuangan yang terdapat di dalam Otoritas Jasa Keuangan, (2017) antara lain:

- a. Terukur

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan dengan mempertimbangkan jangkauan wilayah, biaya, waktu, sistem teknologi, dan memiliki mitigasi terhadap potensi risiko yang timbul dari transaksi produk dan/atau layanan jasa keuangan sehingga akses yang disediakan dan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang dikembangkan memiliki karakteristik yang sesuai dengan sasaran dari kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan.

- b. Terjangkau

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan dapat diakses oleh seluruh golongan masyarakat dengan biaya murah atau tanpa biaya, serta pemanfaatan teknologi.

- c. Tepat Sasaran

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen dan masyarakat yang menjadi sasaran.

- d. Berkelanjutan

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan dilakukan secara berkesinambungan untuk mencapai target yang direncanakan serta memiliki aspek jangka panjang yang mengutamakan kebutuhan dan kemampuan konsumen dan/atau masyarakat.

4) Indikator Inklusi Keuangan

Sebuah ukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui tingkat perkembangan kegiatan inklusi keuangan. Menurut penelitian (Sanistasya, 2019) indikator dalam pengembangan inklusi keuangan antara lain :

a. Akses terhadap lembaga keuangan (*Access*)

merupakan faktor yang digunakan untuk mengukur kemampuan menggunakan jasa keuangan untuk memahami potensi yang menjadi hambatan dalam membuka dan menggunakan rekening bank, seperti bentuk fisik layanan jasa keuangan seperti ATM, kantor bank, dll (Sanistasya, 2019).

b. Penggunaan produk/layanan keuangan (*Usage*)

merupakan faktor yang digunakan untuk mengukur penggunaan jasa keuangan dan penggunaan produk, seperti waktu penggunaan, frekuensi, serta keteraturan akan ketersediaan layanan dan produk keuangan yang memenuhi kebutuhan pelanggan (Sanistasya, 2019).

c. Kualitas produk dan layanan keuangan (*Quality*)

merupakan kriteria untuk menentukan ketersediaan layanan dan produk keuangan yang sesuai dengan permintaan pelanggan (Sanistasya, 2019).

d. Kesejahteraan nasabah (*Welfare*)

merupakan kriteria untuk mengukur pengaruh jasa keuangan terhadap tingkat kehidupan pengguna jasa (Sanistasya, 2019).

2.1.3. Gambaran umum UMKM

1) Pengertian UMKM

Berdasarkan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 2008) pasal 1 mengenai UMKM, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah:

a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukcabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini.

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2) Tujuan UMKM

Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 2008) tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tujuan UMKM yaitu menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

3) Karakteristik UMKM

Karakteristik UMKM adalah ciri atau kondisi faktual yang melekat pada kegiatan usaha dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan usaha. Karakteristik tersebut merupakan karakteristik yang membedakan pelaku usaha berdasarkan ukuran usaha.

Menurut (bank, 2015) UMKM dapat dikelompokkan dalam tiga jenis yaitu:

- a. Usaha Mikro (jumlah karyawan 10 orang).
- b. Usaha Kecil (jumlah karyawan 30 orang).
- c. Usaha Menengah (jumlah karyawan 300 orang).

4) Kriteria UMKM

Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 2008) pasal 6, Kriteria Usaha Mikro yaitu:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tigaratu juta rupiah).

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus jutarupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Sedangkan Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

Tabel 2.1.
Kriteria UMKM berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008

No.	Jenis Usaha	Kriteria	
		Aset	Omzet
1	Usaha Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
2	Usaka Kecil	Lebih dari 50 juta	>300 juta - 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	> 500 juta – 10 Miliar	>2,5 miliar – 50 Miliar

Sumber: (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 2008)

1.1.4. Kinerja

1) Pengertian Kinerja

Menurut Moeheriono (2012:95) Kinerja merupakan tercapainya pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam rangka mencapai misi, visi,

tujuan organisasi serta sasaran yang ditetapkan oleh perusahaan. Kinerja UMKM merupakan keseluruhan hasil kerja yang dicapai dan dibandingkan dengan tujuan, hasil kerja, serta sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya (Wahyudiati, 2017).

Menurut Mutegi, *et al.*, (2015) Kinerja UMKM adalah hasil dan evaluasi kerja suatu perusahaan yang diperoleh individu atau kelompok dalam bentuk pembagian kegiatan dengan tugas dan tanggung jawab untuk jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan standar perusahaan.

Menurut Trianto, *et al.*, (2017) Kinerja keuangan adalah ukuran kesehatan keuangan perusahaan berdasarkan indikator profitabilitas, kecukupan modal, dan likuiditas selama periode waktu tertentu. Kinerja keuangan merupakan hasil atau pencapaian dari pengelolaan aset yang efektif dan efisien selama periode waktu tertentu. Kinerja keuangan merupakan penentuan indikator yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Wulandari, 2020).

Kinerja keuangan merupakan peran penting perusahaan dalam menentukan dan mengevaluasi tingkat keberhasilan suatu perusahaan berdasarkan operasi keuangan yang telah dilakukan (Rudianto, 2013). Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan UMKM merupakan pencapaian usaha dalam menciptakan laba.

2) Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja

Menurut (Munizu, 2010) ada dua jenis faktor yang mempengaruhi kinerja UMKM, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berfungsi sebagai dasar untuk mengembangkan tujuan dan strategi untuk meningkatkan kekuatan organisasi dan mengatasi kekurangan.

Faktor internal meliputi :

a. Aspek keuangan

Kemampuan usaha dalam perolehan laba, modal sendiri, dan modal pinjaman.

- b. Aspek produksi atau operasional
penggunaan bahan baku, ketersediaan dan pemeliharaan mesin/ peralatan,
dan pemanfaatan teknologi modern.
- c. Aspek pasar dan pemasaran
penetapan harga, segmentasi pasar, kegiatan promosi, dan kualitas
produk.
- d. Aspek sumber daya manusia
penyeleksian, pengalaman kerja, pemberian penghargaan, dan
pembagian tugas.

Faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan perusahaan dan tindakan yang akan dilakukannya. Faktor eksternal meliputi :

- a. Aspek kebijakan pemerintah
pembinaan, penyediaan informasi, dan akses ijin usaha.
- b. Aspek peranan lembaga terkait
bantuan permodalan, pelatihan, dan monitoring.
- c. Aspek sosial budaya dan ekonomi
tingkat pendapatan masyarakat, kebutuhan konsumen dan budaya daerah,
dan karakteristik masyarakat.

3) Indikator Kinerja

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada tingkat pertumbuhan usaha, pertumbuhan pendapatan operasional, pertumbuhan modal, serta pertumbuhan jumlah karyawan. Berikut indikator Kinerja UMKM dalam penelitian berdasarkan penelitian (Munizu, 2010) adalah sebagai berikut :

- a. Pertumbuhan usaha
Menurut (Aribawa, 2016) Pertumbuhan usaha didefinisikan sebagai peningkatan penjualan produk dan layanan usaha dari satu siklus usaha ke siklus berikutnya, dan jika tingkat penjualan usaha meningkat, maka laba yang diperoleh juga akan meningkat.

b. Pertumbuhan pendapatan operasional (laba)

Pertumbuhan pendapatan operasional berasal dari aktivitas utama perusahaan, ialah hasil yang diperoleh dari total selisih antara penjualan produk dan jasa dengan total biaya selama jangka waktu tertentu (Yanti, 2019).

c. Pertumbuhan modal

Salah satu faktor terpenting dalam menjalankan suatu usaha adalah modal yang merupakan dasar awal untuk memulai suatu usaha (Purwanti, 2012).

d. Pertumbuhan jumlah karyawan

Jumlah karyawan yang bertambah setiap tahunnya menunjukkan bahwa perusahaan semakin berkembang.

2.2. Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama oleh Sanistasya (2019) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja Usaha Kecil di Kalimantan Selatan. Variabel dalam penelitian ini ialah Variabel Dependen: Kinerja usaha dan Variabel Independen: Literasi keuangan dan Inklusi keuangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan literasi keuangan terhadap kinerja usaha kecil di Provinsi Kalimantan Timur dan Terdapat pengaruh positif dan signifikan inklusi keuangan terhadap kinerja usaha kecil di Provinsi Kalimantan timur.

Penelitian kedua oleh Aribawa (2016) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kinerja dan Keberlangsungan UMKM di Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja dan keberlangsungan UMKM di Jawa Tengah. Variabel dalam penelitian ini ialah Variabel Dependen: Kinerja dan Keberlangsungan UMKM dan Variabel Independen: Literasi keuangan. Berdasarkan hasil analisis dapat ditarik kesimpulan ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja dan keberlanjutan usaha pada UMKM kreatif di Jawa Tengah.

Penelitian ketiga oleh Yanti (2019) dengan judul Pengaruh Inklusi Keuangan Dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM Di Kecamatan Moyo Utara. Variabel dalam penelitian ini ialah Variabel Independen : Inklusi Keuangan (X1) dan Literasi keuangan (X2) dan Variabel Dependen : Kinerja UMKM (Y). Berdasarkan hasil analisis dapat ditarik kesimpulan ini menunjukkan bahwa Inklusi keuangan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja UMKM akan meningkat secara signifikan apabila pelaku UMKM terus meningkatkan inklusi keuangan. Literasi keuangan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja UMKM akan meningkat secara signifikan apabila pelaku UMKM terus meningkatkan literasi keuangan.

Penelitian keempat oleh Sajuyigbe (2017) melakukan penelitian dengan judul *Influence of Financial Inclusion and Social Inclusion on the Performance of Women Owned Businesses in Lagos State, Nigeria*. Variabel dalam penelitian ini ialah Variabel dependen: Women-owned business performance dan Variabel independen: Financial inclusion dan Sosial inclusion. Berdasarkan hasil analisis dapat ditarik kesimpulan ini menunjukkan bahwa inklusi keuangan dan sosial inklusi adalah prediktor bersama kinerja bisnis yang dimiliki oleh perempuan. Penelitian ini juga menegaskan bahwa inklusi sosial memiliki hubungan positif dan signifikan dengan inklusi keuangan.

Penelitian kelima oleh Quartey (2010) melakukan penelitian dengan judul *Issues In SME Development in Ghana and South Africa*. Variabel dalam penelitian ini ialah Variabel dependen: Economic development dan Variabel independen : Small and Medium entrepreneur. Berdasarkan hasil analisis dapat ditarik kesimpulan ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan akses kredit ke UKM, pengusaha harus didorong untuk membentuk koperasi karena lembaga keuangan percaya tekanan teman sebaya sering mengurangi risiko gagal bayar. Pemerintah melalui insentif pajak dapat mendorong lembaga pelatihan tertentu dan LSM untuk memberikan pelatihan pengusaha tentang pencatatan sederhana dan pengetahuan manajerial.

Penelitian keenam oleh Volpe (1998) melakukan penelitian dengan judul *Analysis of Personal Financial Literacy Among Collage Students*. Variabel dalam penelitian ini ialah Variabel dependen: Students dan Variabel independen: Financial literacy. Berdasarkan hasil analisis dapat ditarik kesimpulan ini menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa masih perlu meningkatkan pengetahuan mereka tentang keuangan pribadi. Meskipun pertanyaan yang termasuk dalam survei cukup mendasar tetapi rata-rata keseluruhan jawaban yang benar untuk survei adalah sekitar 53 persen. Tidak ada skor rata-rata untuk setiap bidang pengetahuan umum, tabungan dan pinjaman, asuransi dan investasi diatas 65 persen. Sejauh ini, area terlemah adalah investasi. Tingkat financial literasi paling rendah ditemukan diantara sub kelompok. Selain itu peserta dengan pengetahuan kurang cenderung memiliki pendataan yang salah dan membuat keputusan yang salah dalam bidang pengetahuan umum, tabungan dan pinjaman serta investasi. Selain itu penelitian ini menunjukkan bahwa ada kekurangan sistem pendidikan yang menyebabkan financial literacy yang serius di masyarakat amerika.

Penelitian ketujuh oleh Riwayati (2017) dengan judul *Financial Inclusion of Business Players in Mediating the Success of Small and Medium Enterprises in Indonesia*. Variabel dalam penelitian ini ialah Variabel Dependen: Faktor yang mempengaruhi keberhasilan UMKM (internal dan eksternal) dan Variabel Independen: Financial inclusion. Populasi pada penelitian ini pelaku UMKM pengrajin batu di Kabupaten Magelang. Berdasarkan hasil analisis dapat ditarik kesimpulan ini menunjukkan bahwa faktor internal dan eksternal berpengaruh positif signifikan terhadap keberhasilan UMKM pengrajin batu di Kabupaten Magelang. Dan inklusi keuangan para pelaku bisnis mampu sebagai perantara penentu keberhasilan UMKM.

Penelitian kedelapan oleh Suryani (2017) melakukan penelitian dengan judul *Analisis Literasi Keuangan pada Pelaku Usaha Mikro di Kota Pekanbaru*. Variabel dalam penelitian ini ialah Variabel dependen: Pelaku ekonomi usaha mikro dan Variabel independen: Literasi keuangan. berdasarkan hasil analisis dapat ditarik kesimpulan ini menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan pada pelaku UMKM adalah sedang yaitu sebesar

57,9 persen. Variabel yang mempengaruhi tingkat literasi keuangan adalah perbedaan pendidikan dan pendapatan. Sedangkan gender dan usia tidak mempengaruhi tingkat literasi keuangan pada pelaku UMKM.

Penelitian kesembilan oleh Widayanti (2017) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Financial Literacy Terhadap Keberlangsungan Usaha pada UMKM Desa Jatisari. Variabel dalam penelitian ini ialah Variabel dependen: Keberlangsungan usaha dan Variabel independen: Financial literacy. Berdasarkan hasil analisis dapat ditarik kesimpulan ini menunjukkan bahwa financial literacy memberikan kontribusi terhadap keberlangsungan UMKM.

2.3. Kerangka Konseptual Penelitian

1. Hubungan Variabel Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Non Keuangan Pelaku UMKM

Menurut survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan bahwa kontribusi sektor UMKM terhadap perekonomian Indonesia terbukti sangat penting terhadap Produk Domestik Bruto dan tenaga kerja nasional. Pentingnya peran sektor UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi memerlukan penguatan UMKM. Salah satu bentuk penguatan UMKM adalah dengan meningkatkan keterampilan pengelolaan keuangan dan memperluas akses keuangan bagi UMKM.

Menurut Aribawa (2016) diperlukan pendekatan strategis untuk meningkatkan kinerja, salah satunya adalah literasi keuangan. Literasi keuangan adalah pengetahuan, keyakinan dan keterampilan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka kesejahteraan. Dengan definisi tersebut, diharapkan pelaku usaha jasa keuangan, konsumen produk dan masyarakat luas tidak hanya mengetahui dan memahami jasa keuangan, tetapi juga dapat meningkatkan kemampuannya dalam mengambil keputusan. Hasil penelitian dilakukan oleh Sanistasya (2019) dan Suryani (2017) menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif terhadap Kinerja Non Keuangan Pelaku UMKM.

2. Hubungan Variabel Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja Non Keuangan Pelaku UMKM

Pertumbuhan UMKM berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat karena memiliki berbagai pilihan usaha dan peluang usaha yang luas, namun masih sulit bagi pengusaha UMKM untuk mengembangkan usahanya karena keterbatasan modal. Menerapkan inklusi keuangan sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah permodalan Yanti (2019).

Menurut Inclusion (2016) inklusi keuangan didefinisikan sebagai memberikan setiap orang akses terhadap produk keuangan yang relevan, seperti tabungan, kredit, asuransi, dan pembayaran, serta menampilkan akses yang berkualitas, seperti kemudahan, kenyamanan, keterjangkauan, keamanan dan akses pengguna juga disediakan untuk semua orang.

Hasil penelitian dilakukan oleh Sanistasya (2019), Yanti (2019) dan Riwayati (2017) menunjukkan bahwa inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja Non Keuangan Pelaku UMKM.

3. Hubungan Variabel Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja Non Keuangan Pelaku UMKM

Menurut Abor dan Quartey (2010) Perkembangan UMKM seringkali tertinggal, karena berbagai permasalahan konvensional belum terselesaikan secara tuntas, seperti kapasitas sumber daya manusia, kepemilikan, pembiayaan, pemasaran dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pengelolaan usaha. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja UMKM. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memperkaya literasi keuangan peserta UMKM sehingga pengelolaan dan pertanggungjawabannya dapat dijelaskan dengan baik (Aribawa, 2016).

Menurut survei Bank Dunia tahun 2015, tingkat masyarakat yang belum memiliki akses layanan keuangan di Indonesia dapat dilihat dari sisi permintaan and penawaran. Dari sisi penawaran, asimetri informasi menyebabkan lembaga keuangan memilih nasabah secara berlebihan, mendirikan cabang yang cenderung mahal, dan persepsi ibu rumah tangga yang berpenghasilan rendah, Sehingga tidak ada akses ke layanan keuangan.

Hal ini karena literasi keuangan mendorong penggunaan produk secara efektif dan membantu pelaku usaha mengembangkan keterampilan dan produk keuangan yang optimal sesuai dengan kebutuhannya, yang merupakan syarat untuk meningkatkan inklusi keuangan. Inklusi keuangan dapat mengubah pola pikir pelaku ekonomi tentang uang dan keuntungan. Penelitian yang dilakukan oleh (Sanistasya, 2019) dan (Yanti, 2019), menyatakan bahwa literasi keuangan dan inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja Non Keuangan Pelaku UMKM.

2.3.1. Kerangka berfikir

Gambar 2.1.
Kerangka Konseptual

